

# LAPORAN TINDAK LANJUT

**HASIL SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI  
PENGADILAN NEGERI MAKASSAR  
KELAS I A KHUSUS  
TRIWULAN IV TAHUN 2024**

**Berdasarkan Permenpan dan Reformasi Birokrasi  
Nomor 14 Tahun 2017**



LEMBAR PENGESAHAN

**LAPORAN TINDAK LANJUT**

**HASIL SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI  
PADA PENGADILAN NEGERI MAKASSAR  
KELAS IA KHUSUS  
TRIWULAN IV TAHUN 2024**

**Berdasarkan Permenpan dan Reformasi Birokrasi  
Nomor 14 Tahun 2017**

Disahkan di Makassar  
Pada Hari Jumat, 31 Januari 2025



**Dr. I WAYAN GEDE RUMEGA, S.H., M.H.**  
**NIP. 196807181994031005**

**Sekretaris Tim Survei,**

**NURIYA AWAD, S.H.**  
**NIP. 197503302000032002**

**Ketua Tim Survey**

**SUTISNA SAWATI, S.H.**  
**NIP. 197311231999031007**

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum, Wr. Wb.*

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayahNya sehingga kami Tim Survey Pengadilan Negeri Makassar mampu menyelesaikan Laporan Tindak Lanjut Hasil Survey Persepsi Anti Korupsi TRIWULAN IV Tahun 2024.

Filosofi dasar yang digunakan dalam pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat yang dapat diartikan bahwa kepuasan pelanggan dalam hal kualitas pelayanan bisa dijelaskan/diukur dengan membandingkan persepsi pelayanan yang diterima dengan pelayanan yang diinginkan/diharapkan. Survei ini menanyakan pendapat masyarakat mengenai pengalaman dalam memperoleh pelayanan di Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus, yang diambil secara elektronik dengan menggunakan Aplikasi Survey Pelayanan Elektronik (SISUPER).

Semoga hasil laporan ini dapat menjadi acuan dalam pengambilan kebijakan dan bermanfaat jbagi upaya peningkatan kualita pelayanan seluruh unit pelayanan di Pengadilan Negeri Makassar.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Makassar, 31 Januari 2025

**Tim Survei**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>1</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>3</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>4</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>5</b>
A. Latar Belakang.....	5
B. Tujuan dan Sasaran.....	6
C. Prinsip.....	6
D. Pelaksanaan.....	7
E. Tahapan Pelaksanaan.....	7
<b>BAB II HASIL SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT PENGGUNA LAYANAN PENGADILAN.....</b>	<b>8</b>
<b>BAB III RENCANA TINDAK LANJUT 3 (TIGA) UNSUR TERENDAH HASIL SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT .....</b>	<b>10</b>
<b>BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.....</b>	<b>18</b>
A. Kesimpulan.....	18
B. Rekomendasi.....	18
<b>RUJUKAN: .....</b>	<b>20</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	<b>21</b>

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Makassar berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik.

Komitmen tersebut mengacu amanah Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi serta mengacu kepada Peraturan Menteri PAN & RB 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan disusunnya indeks persepsi anti korupsi yang menjadi salah satu parameter Pemerintahan yang bersih dan melayani.

Pengadilan merupakan satuan kerja yang melaksanakan peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis serta mengelola sumber daya yang cukup besar. Pengadilan Negeri yang akan ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi untuk menjadi lokasi *Pilot Project* menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, perlu memperoleh masukan dari masyarakat menyangkut pelayanan di lingkungannya.

ZI menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani menitikberatkan pada Integritas penyelenggara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Integritas Penyelenggara pelayanan publik akan dinilai diantaranya dapat dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya diluar tarif resmi yang telah ditetapkan.

## **B. Tujuan dan Sasaran**

Maksud Penyusunan Laporan Tindak Lanjut Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi pada pengadilan ini adalah sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme.

Tujuan Penyusunan Laporan Tindak Lanjut Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi adalah tersusunnya rekomendasi terkait kajian menuju zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.

## **C. Prinsip**

Dalam melaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat dilakukan dengan memperhatikan prinsip:

### **1. Transparan**

Hasil survey persepsi anti korupsi harus dipublikasikan pada website resmi Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus dan mudah diakses oleh seluruh masyarakat

### **2. Partisipatif**

Dalam melaksanakan survey melibatkan peran serta masyarakat serta pihak terkait lainnya untuk mendapatkan hasil survey yang sebenarnya

### **3. Akuntabel**

Hal-hal yang diatur dalam Survey persepsi anti korupsi harus dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan secara benar dan konsisten kepada pihak yang berkepentingan berdasarkan kaidah umum yang berlaku

### **4. Berkesinambungan**

Survey persepsi anti korupsi dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan untuk mengetahui perkembangan peningkatan kualitas pelayanan

### **5. Keadilan**

Pelaksanaan Survey persepsi anti korupsi harus menjangkau semua pengguna layanan tanpa membedakan status ekonomi, budaya, agama, golongan, dan lokasi geografis serta kapabilitas fisik dan mental

## 6. Netralitas

Dalam melaksanakan Survey persepsi anti korupsi, surveyor tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi, golongan dan tidak berpihak.

## D. Pelaksanaan

Pengukuran/survei Persepsi Anti Korupsi (IPAK) di Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus ini dilaksanakan pada Bulan Oktober - Desember 2024

## E. Tahapan Pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan survei Persepsi Anti Korupsi (IPAK) di Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus , antara lain:

1. Tim survei menentukan metode survei, yaitu dengan metode kuantitatif dan sampel diambil dengan **Teknik Sampel Morgan dan Krejcie**.
2. Tim survei menyiapkan fasilitas untuk pengambilan responden secara elektronik yaitu 1 komputer /pc, melalui Aplikasi Survey Pelayanan Elektronik (SISUPER) dimana instrument kuesioner pada Aplikasi ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik
3. Memastikan bahwa computer/pc yang digunakan untuk melaksanakan survei sudah terkoneksi dengan internet
4. Membuka browser / peramban halaman website
5. Membuka alamat website :  
<http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/index.php/pengadilan/099422>
6. Tim survei melakukan survei sesuai jadwal.
7. Tim survei menyajikan hasil analisa dalam bentuk analisis statistik deskriptif.

## BAB II

### HASIL SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI PENGGUNA LAYANAN PENGADILAN

Kuesioner yang terkumpul dan terisi dengan lengkap pada Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (SISUPER) sejumlah 104 data. Berdasarkan survei kepuasan masyarakat di Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus dan hasil analisis data yang telah dilakukan (lihat lampiran) diketahui bahwa Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) pada Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus sebesar **98,39% atau pada nilai 3,94**.

Hasil IPAK tersebut di atas, terdiri dari sepuluh ruang lingkup, analisis selanjutnya adalah mendeskripsikan hasil analisis terhadap kesembilan ruang lingkup tersebut.

Tabel 6  
Hasil  
Pengukuran Indeks Persepsi Anti Korupsi Pengadilan  
di Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus

No	Unsur Pelayanan	Nilai Rata-rata
U1	Manipulasi Peraturan	3,87
U2	Penyalahgunaan Jabatan	4,00
U3	Menjual Pengaruh	3,9
U4	Transaksi Biaya	3,80
U5	Biaya Tambahan	3,96
U6	Hadiah	3,93
U7	Transparansi Biaya	3,93
U8	Percaloan	3,96
U9	Perbuatan Curang	3,96
U10	Transaksi Rahasia	4,00
	Total	<b>39,4</b>
	Rata Rata	<b>3,94</b>

Berikut ini 3 unsur terendah pada Hasil Survey Persepsi Anti Korupsi TRIWULAN III Tahun 2024.

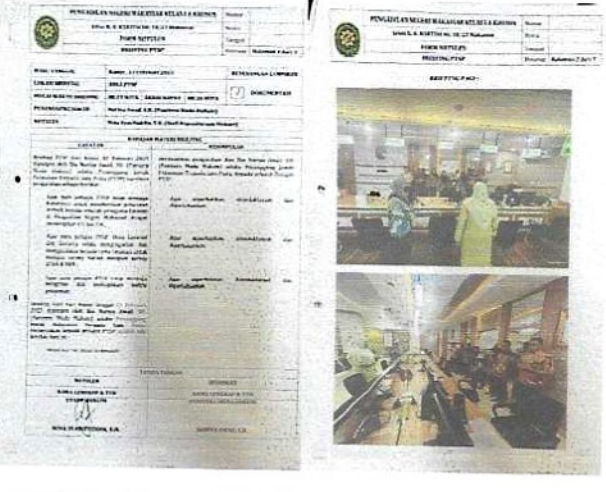


<b>No.</b>	<b>Ruang Lingkup</b>	<b>Indeks</b>	<b>Nilai</b>
<b>1</b>	Indikator Menjual Pengaruh (U3)	3,90	101
<b>2</b>	Indikator Manipulasi Peraturan (U1)	3,87	95
<b>3</b>	Indikator Transaksi Biaya (U4)	3,80	87

Adapun Tindak Lanjut Hasil Survey Persepsi Anti Korupsi Triwulan IV Tahun 2024 akan disajikan pada Bab 3.

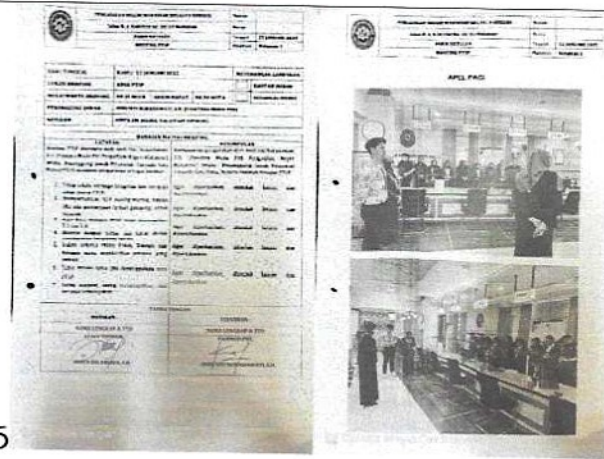
### BAB III TINDAK LANJUT HASIL SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI

Adapun Tindak Lanjut 3 unsur terendah yang akan dilakukan oleh Pengadilan Negeri Makassar untuk meningkatkan pelayanan yaitu sebagai berikut.

No	Prioritas Unsur	Program/Kegiatan	Tindak Lanjut
1.	Indikator Menjual Pengaruh (U3)	Pengarahan peningkatan integritas dan kedisiplinan aparatur Pengadilan Negeri Makassar	<p>Memberikan pengarahan kepada Aparatur Pengadilan Negeri Makassar agar tidak memberikan suatu janji kepada pengguna layanan yang dapat menciderai integritas. Panitera Muda Hukum juga mengingatkan agar dapat menjaga kedisiplinan dengan tidak meninggalkan meja PTSP saat waktu pelayanan.</p> <p>Berikut ini salah satu kegiatan yang dipimpin oleh Panitera Muda Hukum, Ibu Nuriya Awad.</p> 
2.	Indikator Manipulasi Peraturan (U1)	Pengaruh kepada Petugas PTSP agar dalam melayani tamu petugas hanya berpedoman pada SOP yang berlaku. Petugas wajib megecek kelengkap berkas milik tamu saat melayani. Apabila	<p>Memberikan pengarahan kepada Petugas PTSP agar senantiasa memperhatikan kelengkapan berkas saat melayani tamu di meja PTSP.</p> <p>Berikut ini salah satu kegiatan yang dipimpin oleh Panitera Muda PHI, Ibu Andi Nurasiwaty.</p>

terdapat dokumen yang salah/kurang lengkap agar minta pengguna layanan untuk melengkapi berkas tersebut. Pada meja PTSP juga tersedia check list persyaratan berkas layanan.

6



Mempublikasikan Standar Pelayanan pada media sosial instagram Pengadilan Negeri Makassar.



Mempublikasikan Standar Pelayanan pada media sosial Facebook Pengadilan Negeri Makassar.



3. Indikator Transaksi Biaya (U4)

Mempublikasikan seluruh informasi biaya/tarif

Berikut ini biaya/tarif pelayanan yang telah dipublikasikan di website resmi PN Makassar Kelas I A Khusus

pelayanan melalui media sosial

<https://pnmakassar.go.id/website/index.php/layanan-hukum/prosedur-berperkara/biaya-perkara>.

The screenshot displays the official website of the Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus. The page is titled 'BIAYA PERKARA' and provides a detailed list of court fees. The fees are organized into three main sections: A.1. Biaya Perkara (Court Fees), A.2. Biaya Perkara Khusus (Special Court Fees), and A.3. Biaya Perkara Lainnya (Other Court Fees). Each section contains a table with columns for 'No.', 'Uraian' (Description), and 'Biaya' (Fee). The fees are listed in Indonesian Rupiah (Rp.).

**A.1. Biaya Perkara (Peraturan dan Peraturan Mahkamah Agung)**

No.	Uraian	Biaya
1.	Biaya Pendaftaran	Rp. 10.000,-
2.	Biaya Proses	Rp. 10.000,-
3.	Biaya Pengantar Perkara	Rp. 10.000,-
4.	Biaya Pengantar Perkara (Peraturan Mahkamah Agung No. 1/2016)	Rp. 10.000,-
5.	Biaya Proses	Rp. 10.000,-
6.	Biaya Mula	Rp. 10.000,-
7.	Biaya Pengantar Perkara (Peraturan Mahkamah Agung No. 1/2016)	Rp. 10.000,-
8.	Biaya Pendaftaran	Rp. 10.000,-
9.	Biaya Pengantar Perkara (Peraturan Mahkamah Agung No. 1/2016)	Rp. 10.000,-

**A.2. Biaya Perkara Khusus (Peraturan Mahkamah Agung No. 1/2016)**

No.	Uraian	Biaya
1.	Biaya Pendaftaran	Rp. 10.000,-
2.	Biaya Proses	Rp. 10.000,-
3.	Biaya Pengantar Perkara	Rp. 10.000,-
4.	Biaya Pengantar Perkara (Peraturan Mahkamah Agung No. 1/2016)	Rp. 10.000,-
5.	Biaya Proses	Rp. 10.000,-
6.	Biaya Mula	Rp. 10.000,-
7.	Biaya Pengantar Perkara (Peraturan Mahkamah Agung No. 1/2016)	Rp. 10.000,-
8.	Biaya Pendaftaran	Rp. 10.000,-
9.	Biaya Pengantar Perkara (Peraturan Mahkamah Agung No. 1/2016)	Rp. 10.000,-

**A.3. Biaya Perkara Lainnya (Peraturan Mahkamah Agung No. 1/2016)**

No.	Uraian	Biaya
1.	Biaya Pendaftaran	Rp. 10.000,-
2.	Biaya Proses	Rp. 10.000,-
3.	Biaya Pengantar Perkara	Rp. 10.000,-
4.	Biaya Pengantar Perkara (Peraturan Mahkamah Agung No. 1/2016)	Rp. 10.000,-
5.	Biaya Proses	Rp. 10.000,-
6.	Biaya Mula	Rp. 10.000,-
7.	Biaya Pengantar Perkara (Peraturan Mahkamah Agung No. 1/2016)	Rp. 10.000,-
8.	Biaya Pendaftaran	Rp. 10.000,-
9.	Biaya Pengantar Perkara (Peraturan Mahkamah Agung No. 1/2016)	Rp. 10.000,-



			<p>1. ...</p> <p>2. ...</p> <p>3. ...</p> <p>4. ...</p> <p>5. ...</p> <p>6. ...</p> <p>7. ...</p> <p>8. ...</p> <p>9. ...</p> <p>10. ...</p> <p>11. ...</p> <p>12. ...</p> <p>13. ...</p> <p>14. ...</p> <p>15. ...</p> <p>16. ...</p> <p>17. ...</p> <p>18. ...</p> <p>19. ...</p> <p>20. ...</p> <p>21. ...</p> <p>22. ...</p> <p>23. ...</p> <p>24. ...</p> <p>25. ...</p> <p>26. ...</p> <p>27. ...</p> <p>28. ...</p> <p>29. ...</p> <p>30. ...</p> <p>31. ...</p> <p>32. ...</p> <p>33. ...</p> <p>34. ...</p> <p>35. ...</p> <p>36. ...</p> <p>37. ...</p> <p>38. ...</p> <p>39. ...</p> <p>40. ...</p> <p>41. ...</p> <p>42. ...</p> <p>43. ...</p> <p>44. ...</p> <p>45. ...</p> <p>46. ...</p> <p>47. ...</p> <p>48. ...</p> <p>49. ...</p> <p>50. ...</p> <p>51. ...</p> <p>52. ...</p> <p>53. ...</p> <p>54. ...</p> <p>55. ...</p> <p>56. ...</p> <p>57. ...</p> <p>58. ...</p> <p>59. ...</p> <p>60. ...</p> <p>61. ...</p> <p>62. ...</p> <p>63. ...</p> <p>64. ...</p> <p>65. ...</p> <p>66. ...</p> <p>67. ...</p> <p>68. ...</p> <p>69. ...</p> <p>70. ...</p> <p>71. ...</p> <p>72. ...</p> <p>73. ...</p> <p>74. ...</p> <p>75. ...</p> <p>76. ...</p> <p>77. ...</p> <p>78. ...</p> <p>79. ...</p> <p>80. ...</p> <p>81. ...</p> <p>82. ...</p> <p>83. ...</p> <p>84. ...</p> <p>85. ...</p> <p>86. ...</p> <p>87. ...</p> <p>88. ...</p> <p>89. ...</p> <p>90. ...</p> <p>91. ...</p> <p>92. ...</p> <p>93. ...</p> <p>94. ...</p> <p>95. ...</p> <p>96. ...</p> <p>97. ...</p> <p>98. ...</p> <p>99. ...</p> <p>100. ...</p>
--	--	--	---







The image shows two pages of a legal document. The left page is the 'KATA PENGANTAR' (Foreword) and the right page is the 'DAFTAR ISI' (Table of Contents). Both pages are headed by the logo and name of the Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus. The foreword page contains introductory text and a list of sections. The table of contents page lists the sections and their corresponding page numbers.



## **BAB IV KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis data terhadap data penelitian ini, disimpulkan bahwa Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) pengguna layanan pengadilan di Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus sebesar **3,94** atau masuk pada kategori **Bersih dari Korupsi**. Adapun kesimpulan pada masing-masing ruang lingkup sebagai berikut:

1. Indikator Manipulasi Peraturan, mendapat indeks **3,87**;
2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan, mendapat indeks **4,00**;
3. Indikator Menjual Pengaruh, mendapat indeks **3,90**;
4. Indikator Transaksi Biaya, mendapat indeks **3,80**;
5. Indikator Biaya Tambahan, mendapat indeks **3,96**;
6. Indikator Hadiah, mendapat indeks **3,93**;
7. Indikator Transparansi Biaya, mendapat indeks **3,93**;
8. Indikator Percaloan, mendapat indeks **3,96**;
9. Indikator Perbuatan Curang, mendapat indeks **3,96**;
10. Indikator Transaksi Rahasia, mendapat indeks **4,00**;

### **B. Rekomendasi**

Merujuk pada hasil indeks persepsi pada setiap indikator terhadap pelayanan di Satuan Kerja Pengadilan Negeri Makassar Triwulan IV Tahun 2024 tersebut di atas, menunjukkan bahwa **mayoritas indikator memiliki indeks di atas 3,4 atau masuk pada persepsi bersih dari korupsi**.

Kepada jajaran manajemen dan seluruh pegawai di Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus, hendaknya meningkatkan pelayanannya khususnya pada ruang lingkup Manipulasi Peraturan, Transaksi Biaya dan Hadiah. Berdasarkan hasil survei ini, ketiga ruang lingkup tersebut berada pada unsur terendah, sehingga untuk melaksanakan pelayanan secara maksimal agar diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Agar Petugas PTSP dapat menjaga integritas dalam memberikan pelayanan
2. Agar Petugas PTSP meningkatkan kedisiplinan dalam mematuhi jam kerja pelayanan di meja PTSP
3. Agar Petugas PTSP memahami SOP pelayanan sehingga dapat memberikan pelayanan lebih baik lagi.
4. Agar Petugas PTSP diberikan pelatihan dan sosialisasi untuk SOP serta penerapan Reward dan Punishment
5. Agar Petugas PTSP senantiasa menyiapkan checklist di meja PTSP masing-masing

**RUJUKAN:**

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: KEP/25/M.PAN/ 2/2004 Tentang Pedoman Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Ridwan. 2008. Dasar-dasar Statistik. Penerbit Alfa Beta. Bandung.

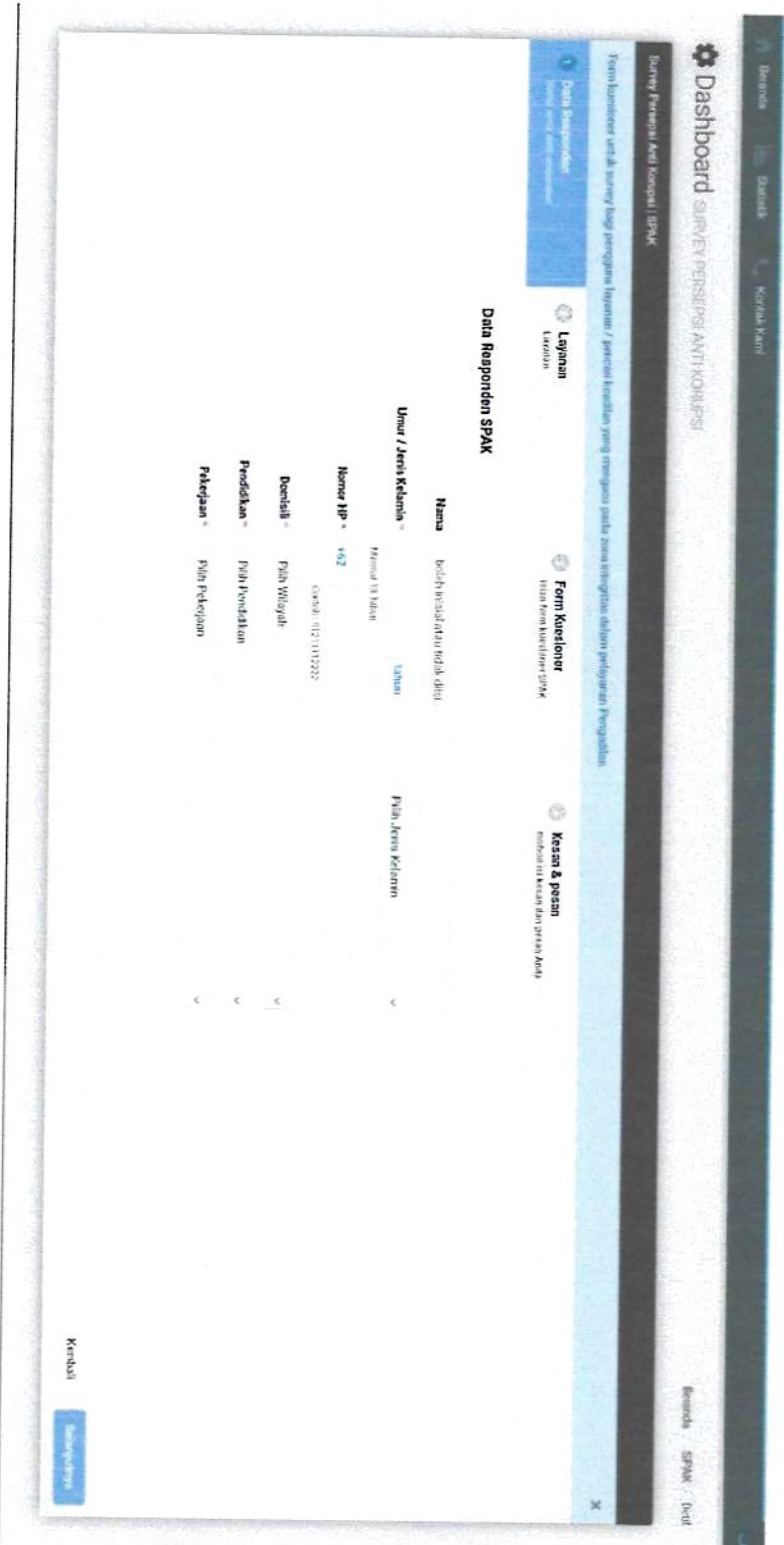
Saifuddin Azwar. 2009. Penyusunan Skala Psikologi. Makassar: Pustaka Belajar

Sutrisno Hadi. 2003. Statistik Jilid 2. Penerbit ANDI Offset.

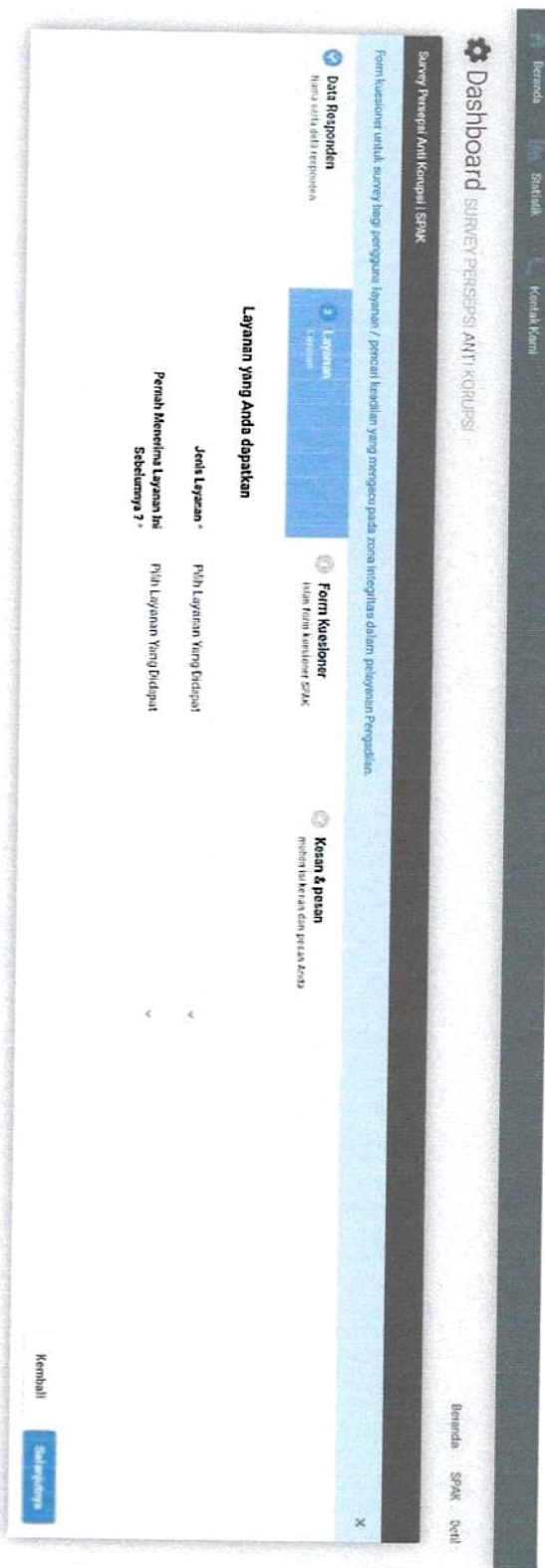
Sutrisno Hadi. 2003. Statistik Jilid 3 Penerbit ANDI Offset.

# LAMPIRAN-LAMPIRAN.

APLIKASI SURVEY PELAYANAN ELEKTRONIK



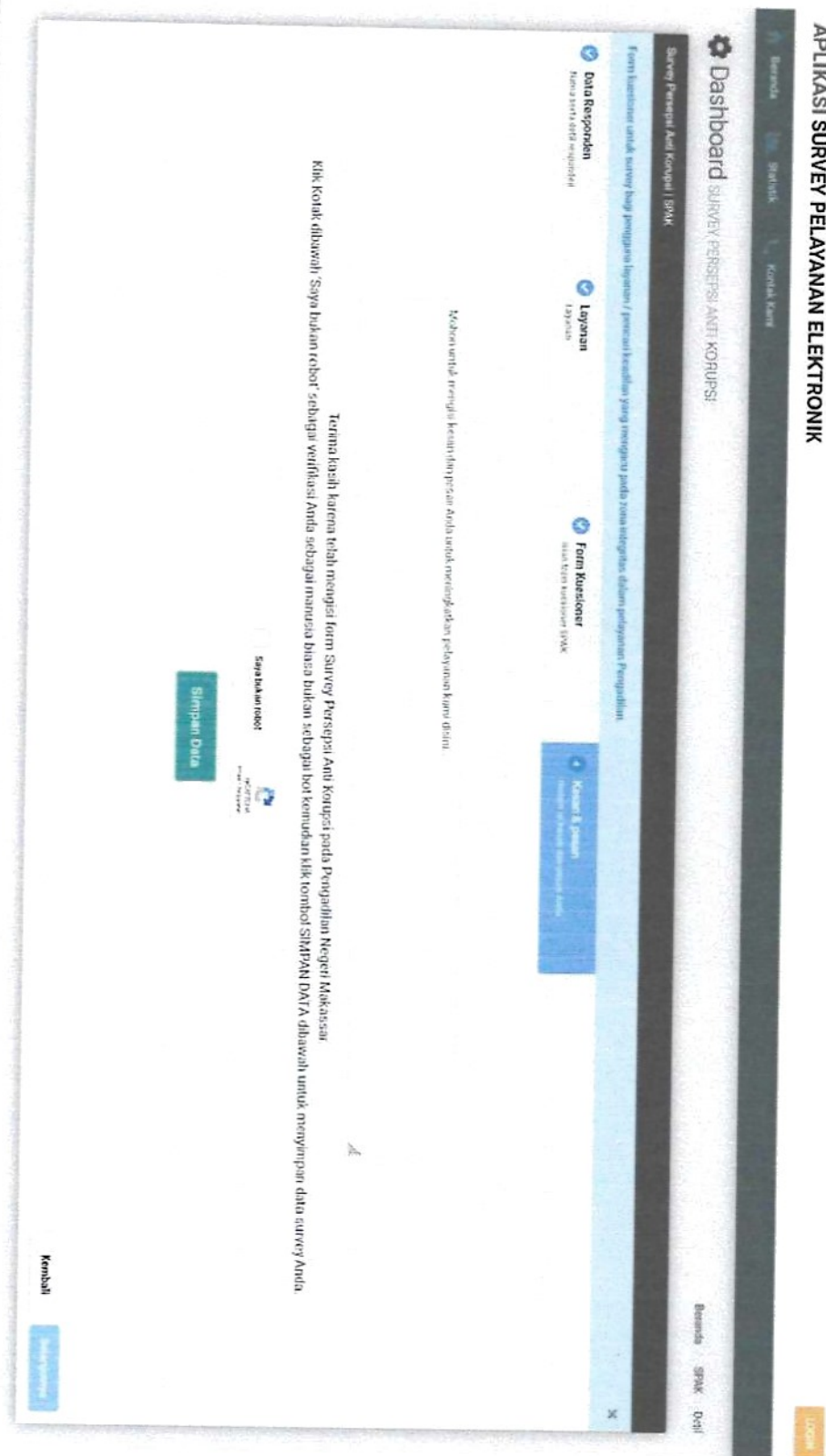
### APLIKASI SURVEY PELAYANAN ELEKTRONIK







### APLIKASI SURVEY PELAYANAN ELEKTRONIK

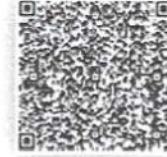


1/2/25, 4:57 PM

siSUPER (SPAK, SKM, HARIAN) | Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**PENGADILAN NEGERI MAKASSAR**  
 Jl. P. A. Kartini No. 1600 KOTAMAKASSAR  
 SULAWESI SELATAN  
<http://www.pn-makassar.go.id/>



**PUBLIKASI INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI**  
 Periode 1 Oktober 2024 sampai 31 Desember 2024

## SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI

## NILAI INDEKS

3,94 / 98,39%

Jumlah	31 RESPONDEN	
Jenis Kelamin	LAKI-LAKI 23	
	PEREMPUAN 8	
Pendidikan	Tidak / Belum Sekolah	0 Diploma 2 0
	SD 0	Diploma 3 0
	SMP 0	S1 19
	SMU 3	S2 8
	Diploma 1 0	S3 1
	Pekerjaan	PNS 3
	TNI 0	WRAUSAHA 2
	POLRI 0	TENAGA KONTRAK 0
	LAINNYA 24	

Evaluasi 3 Unsur Terendah Dengan Nilai Per Unsur :

1. Apakah selalu mudah dalam mendapatkan informasi tentang tarif/biaya baik melalui website ataupun petugas layanan di Pengadilan ? 3,806
2. Apakah pelayanan oleh petugas di Pengadilan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku? 3,871
3. Pernahkah dihubungi oleh seseorang ( karyawan Pengadilan ) yang akan membantu dalam pengurusan surat / berkas perkara ? 3,903

Tindak lanjut dan 3 Unsur Terendah

DATA REGISTER TINDAK LANJUT BELUM DIISI

Terimakasih atas penilaian yang telah Anda berikan. Masukan Anda sangat bermanfaat bagi kemajuan satuan kerja kami agar terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat.

2 Januari 2025  
 Ketua Pengadilan Negeri

-25-

LAMPIRAN II  
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN  
 APARATUR NEGARA  
 DAN REFORMASI BIROKRASI  
 NOMOR 14 TAHUN 2017  
 TENTANG  
 PEDOMAN PENYUSUNAN SURVEI KEPUASAN  
 MASYARAKAT  
 UNIT PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK

Untuk memudahkan pengambilan sampel tanpa menghitung, dapat melihat pada tabel berikut :

**Tabel 1 Sampel Morgan dan Krejcie**

Populasi (N)	Sampel (n)	Populasi (N)	Sampel (n)	Populasi (N)	Sampel (n)
10	10	220	140	1200	291
15	14	230	144	1300	297
20	19	240	148	1400	302
25	24	250	152	1500	306
30	28	260	155	1600	310
35	32	270	159	1700	313
40	36	280	162	1800	317
45	40	290	165	1900	320
50	44	300	169	2000	322
55	48	320	175	2200	327
60	52	340	181	2400	331
65	56	360	186	2600	335
70	59	380	191	2800	338
75	63	400	196	3000	341
80	66	420	201	3500	346
85	70	440	205	4000	351
90	73	460	210	4500	354
95	76	480	214	5000	357
100	80	500	217	6000	361
110	86	550	226	7000	364
120	92	600	234	8000	367

130	97	650	242	9000	368
140	103	700	248	10000	370
150	108	750	254	15000	375
160	113	800	260	20000	377
170	118	850	265	30000	379
180	123	900	269	40000	380
190	127	950	274	50000	381
200	132	1000	278	75000	382
210	136	1100	285	1000000	384

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR  
 NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI,

td

ASMAN ABNUR